

## **PSIKOLOGI DALAM PROSES PERUBAHAN SOSIAL**

*Maya Fitria*

Berbagai teori sosial, ekonomi, politik, dan budaya lahir dari pemberian makna atas realitas sosial. Pemaknaan yang berbeda-beda tentu saja akan berimplikasi pada perlakuan yang berbeda pula. Pemaknaan yang berbeda atas satu realitas sosial yang sama sangat dipengaruhi oleh pengambilan sudut pemikiran atau katakanlah perspektif yang berbeda.

Satu hal penting dari teori-teori sosial adalah peranannya dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai proses aksi manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Perubahan sosial akan diawali dengan proses pemaknaan sebuah realitas sosial. Bagaimana seorang ilmuwan memaknai sebuah realitas sangat berpengaruh pada proses perubahan sosial yang dilakukannya nanti karena pada dasarnya, perubahan sosial dibangun atas pemahaman teoritik dan suatu teori akan sangat berpengaruh dalam membentuk suatu program aksi di lapangan.

Sebagai contoh, prinsip “rekayasa” yang oleh satu teori dianggap sebagai keharusan pendekatan, tetapi oleh teori lain justru dianggap sebagai suatu bentuk dominasi dan penindasan dari ilmuwan sosial terhadap masyarakat. Begitu pula, prinsip “pengambilan jarak” antara peneliti dengan yang diteliti, prinsip bebas nilai, dan sebagainya yang semuanya memberikan implikasi yang sangat berbeda pada pilihan aksi sebagai ‘klaim’ proses perubahan sosial yang dilakukan. Perbedaan asumsi tersebut tidak saja mempengaruhi berbagai metode penelitian dan pendidikan sosial, namun juga membawa perbedaan visi dan orientasi hubungan antara ilmuwan sosial dan masyarakat dalam proses perubahan.

Psikologi adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan proses perubahan sosial. Psikologi adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial yang hasil kajian-kajian dan penelitiannya lekat dengan legitimasi sebuah proses perubahan sosial yang dilakukan oleh para praktisi.

Sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, psikologi dihadapkan pula pada berbagai macam paradigma yang melatarbelakangi tiap teori. Psikologi sendiri sekarang ini

‘dituduh’ sebagai ilmu yang elit, ilmu yang hanya dapat dijamah oleh ilmuwan psikologi sendiri dan merupakan sumber legitimasi dari orang-orang yang berkuasa.

Prilleltensky (1994) mengatakan bahwa psikologi lebih merupakan ‘pelayan’ dari lembaga dan kondisi status quo daripada representasi sebagai agen perubahan sosial. Individu dikaji secara asosial dan ahistoris sehingga kehidupannya dipelajari secara terpisah dari keadaan yang lebih luas, yaitu konteks sosiopolitis.

Fakih (2001) mengemukakan, sekarang ini terdapat dua paham teori sosial yang saling kontradiktif, yaitu teori-teori sosial yang digolongkan pada “teori sosial regulasi” berhadapan dengan “teori-teori sosial emansipatori” atau dikenal dengan “teori sosial kritis”. Teori sosial regulasi yang bersemboyan bahwa ilmu sosial harus mengabdikan pada stabilitas, pertumbuhan dan pembangunan, bersifat objektif serta secara politik netral dan bebas nilai. Dalam pandangan ini, teori sosial dikontrol oleh teorisi sedangkan masyarakat dilihat hanya sebagai objek pembangunan mereka. Pandangan teori sosial ini memunculkan kaidah “rekayasa sosial” yang menempatkan masyarakat sebagai objek para ahli, direncanakan, diarahkan, dan dibina untuk berpartisipasi sesuai teori yang dikemukakan yang mengontrol.

Bagi aliran kritis, ilmu sosial justru melakukan penyadaran kritis masyarakat terhadap sistem dan struktur sosial yang dipandang sebagai dehumanitatif. Kegiatan ilmiah demi perubahan sosial bukanlah arena yang netral, apolitik, dan berada pada ruang dan masa yang steril. Ilmu sosial yang bertindak tidak memihak, netral, dan objektif, serta berjarak (*detachment*) adalah suatu bentuk ketidakadilan tersendiri, paling tidak ikut melanggengkan ketidakadilan.

Bagaimana sebenarnya posisi psikologi sebagai ilmu saat ini. Perspektif mana yang selama ini mendominasi ilmuwan-ilmuwan psikologi dalam berfikir dan bertindak? Kepada golongan masyarakat yang mana selama ini pengabdian psikologi?

## PARADIGMA

Perspektif dalam bidang keilmuan sering juga disebut paradigma (*paradigm*), kadang-kadang disebut pula mazhab pemikiran (*school of thought*) atau teori. Istilah-istilah lain yang sering diidentikkan dengan perspektif adalah model, pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan pandangan dunia (*worldview*). Paradigma sendiri merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam buku klasiknya *The Structure of Scientific Revolutions* (Mulyana, 2001). Dalam buku tersebut, Kuhn menjelaskan tentang model bagaimana suatu aliran teori itu lahir dan berkembang. Menurutnya, disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi

paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang baru. Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Berkembangnya suatu paradigma erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu paradigma mampu melakukan konsolidasi dan mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, pengembangan dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah pendukungnya. Oleh karena itu, untuk memahami berkembang maupun runtuhnya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan teori tersebut (Khun, 1970).

Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang. Aspek paradigma seperti inilah yang sekaligus merupakan kekuatan sekaligus kelemahannya. Kekuatannya adalah hal itu memungkinkan tindakan, sedang kelemahannya adalah bahwa alasan untuk melakukan tindakan tersebut tersembunyi dalam asumsi-asumsi paradigma yang tidak dipersoalkan lagi. Dapat didefinisikan, paradigma adalah ideologi dan praktik suatu komunitas ilmuwan yang menganut suatu pandangan yang sama untuk menilai aktivitas penelitian dan menggunakan metode yang serupa (Mulyana, 2001)

Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat realitas. Paradigma mempengaruhi apa yang ingin dilihat, bagaimana cara melihat, apa yang dianggap sebagai masalah, bagaimana cara mengatasi masalah, dan sebaliknya paradigma juga mempengaruhi apa yang tidak dilihat, apa yang tidak ingin diketahui, dan apa yang dipilih. Oleh karena itu, membicarakan perbedaan paradigma tidak memiliki relevansi dengan membicarakan siapa yang salah dan siapa yang benar karena masing-masing menggunakan alasan, nilai, semangat, dan visi yang berbeda tentang fenomena yang ada. Dominasi teori sosial tertentu lebih disebabkan oleh dominasi paradigma tertentu yang juga berkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan penganut paradigma tersebut, sehingga dapat dikatakan tidak ada sangkut-pautnya dengan kebenaran sebuah teori atas yang lainnya.

## **PARADIGMA-PARADIGMA ILMU-ILMU SOSIAL**

Dalam rangka memberikan bingkai terhadap kecenderungan sikap ilmiah sarjana psikologi selama ini, diperlukan penjelasan mengenai peta paradigma ilmu sosial yang selama ini ada. Berikut ini akan diuraikan beberapa model pemetaan paradigma dalam

melihat masalah sosial seperti dikemukakan oleh Fakih (2001). Pertama adalah model pemetaan paradigma sosial yang diuraikan oleh salah seorang penganut mazhab Frankfurt, yaitu Jurgen Habermas. Model pembagian paradigma kedua adalah dengan mengikuti tokoh pemikir pendidikan kritis asal Brazil, Paulo Freire. Model ketiga adalah peta paradigma sosiologi yang dibuat oleh Barrel dan Morgan.

### **Ilmu Sosial Paradigma Dominatif lawan Emansipatoris**

Habermas secara sederhana melakukan pembagian paradigma ilmu-ilmu sosial menjadi tiga paradigma yang selanjutnya dapat digunakan untuk memahami sisi perbedaan paradigma yang ada dalam ilmu-ilmu sosial. Pertama, *instrumental knowledge*. Dalam perspektif paradigma 'instrumental' ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya. Yang dimaksud Habermas dengan paradigma pengetahuan instrumental ini sebenarnya adalah paradigma positivisme. Dalam Hughes (1990) dikatakan, positivisme pada dasarnya adalah ilmu sosial yang dipinjam dari pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Schoyer dalam Fakih (2001) menandakan, positivisme adalah aliran filsafat yang berakar pada tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara ilmu alam menguasai benda, yakni dengan kepercayaan adanya universalisme dan generalisasi, melalui metode determinasi, *fixed law* atau kumpulan hukum teori. Asumsinya adalah, bahwa penjelasan tunggal bersifat universal yang berarti cocok atau *appropriate* untuk semua, kapan saja, di mana saja suatu fenomena sosial itu terjadi. Dengan asumsi tersebut, menjadi sebuah keyakinan dan keharusan bahwa riset sosial harus didekati dengan metode ilmiah, yaitu objektivitas, netral, dan bebas nilai (Mulyana, 2001). Oleh karena itu, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai (bebas nilai, *wertfreiheit*) dalam rangka menuju pemahaman objektif atas fenomena sosial (Nugroho, 2001).

Positivisme melegalkan pembuktian kebenaran sebuah tatanan sosial melalui penelitian eksperimental atau laboratorium, meskipun sering terjadi hipotesis keliru yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya (Fakih, 2001). Lanjutnya, kaum verifikasiionis (membuktikan kebenaran) dan falsifikasiionis (membuktikan kekeliruan) hipotesis tentang tatanan sosial, berpendapat bahwa pada hakikatnya, pengetahuan merupakan proses kumulasi di mana pemahaman baru diperoleh sebagai tambahan atas kumpulan pengetahuan atau penghapusan atas pengetahuan dengan hipotesis yang sudah terbukti salah.

Sikap-sikap tertentu menjadi syarat yang harus dilakukan agar mencerminkan penggunaan payung paradigma positivisme yang selanjutnya 'diklaim' sebagai sebuah

sikap “ilmiah”. Sikap tersebut adalah bahwa ilmu sosial dan penelitian sosial haruslah bersikap netral dan tidak memihak, tidak boleh subjektif, melainkan harus objektif, rasional, tidak boleh emosional, komitmen, dan empati. Ilmu sosial juga harus mampu menjaga jarak (*detachment*) terhadap objek studi dan hasil kajian, bersikap universal, dapat diterapkan di mana dan kapan saja.

Menurut Fakih (2001), pendirian paradigma positivisme dapat dipahami secara lebih jelas dengan coba memahami pendirian teori-teori anti-positivisme. Meskipun secara epistemologis kaum anti-positivis beragam jenisnya, secara pasti mereka semuanya tidak dapat menerima berlakunya kaidah-kaidah universalitas, karena menurut mereka, yang terjadi pada sebuah tatanan sosial tertentu tidak secara serta merta akan dapat berlaku pada semua tatanan atau peristiwa sosial. *Realitas sosial adalah nisbi*, hanya dapat dipahami dari pandangan orang per orang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial tertentu.

Kedua, adalah paradigma interpretatif. Paradigma *interpretative* juga dikenal sebagai aliran *hermeneutic knowledge* berpendapat bahwa pengetahuan dan khususnya ilmu-ilmu sosial dan penelitian sosial ‘hanya’ dimaksud untuk memahami secara sungguh-sungguh. Dasar filsafat paradigma *interpretative* adalah *phenomenology* dan *hermeneutics*, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan minat yang besar untuk memahami. Motonya adalah “biarkan fakta bicara atas nama dirinya sendiri”.

Ketiga, adalah paradigma kritik atau *critical/emancipatory knowledge*. Oleh paradigma ini, ilmu sosial lebih dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan manusia dari segenap ketidakadilan. Kritik mendasar dengan sasaran paradigma *instrumental knowledge* adalah, bahwa ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sosial tidak boleh dan tidak mungkin bersifat netral. Paradigma kritis memperjuangkan pendekatan yang bersifat holistik serta menghindari cara berfikir deterministik dan reduksionistik. Keterlibatan paradigma ini tidak hanya dalam teori yang spekulatif atau abstrak melainkan juga lebih dikaitkan dengan pemihakan dan upaya emansipasi masyarakat dalam pengalaman kehidupan mereka sehari-hari.

Lebih lanjut, paradigma ini mengkritik positivisme sebagai sebuah paradigma berfikir yang berimplikasi pada praktik perubahan sosial yang dilakukan yaitu dengan penempatan rakyat selalu sebagai *passive object* untuk diteliti, dan selalu menjadi objek “rekayasa sosial”. Positivisme memberikan keyakinan fikir bahwa rakyat tidak mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Perubahan sosial harus didesain oleh ahli, perencana yang bukan rakyat, kemudian dilaksanakan oleh para teknisi.

Berdasarkan keprihatinan tersebut, paradigma kritik mencoba menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam perubahan sosial. Rakyat harus diletakkan sebagai

pusat proses perubahan dan penciptaan maupun dalam mengontrol pengetahuan mereka. Paradigma kritik justru memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial pembebasan, yang tadinya dianggap ‘tidak ilmiah’.

### **Paradigma Reformasi dan Transformasi**

Freire berpendapat, tugas teori sosial adalah melakukan apa yang disebutnya sebagai *conscientizacao* atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas, yakni suatu sistem dan struktur ‘dehumanisasi’ yang membunuh kemanusiaan. Gramsci, sebagai salah satu yang sangat mempengaruhi Freire, menyebutnya sebagai upaya *counter hegemony* (Patria & Arief, 1999). Proses dehumanisasi terjadi melalui mekanisme kekerasan, secara fisik dan dipaksakan, maupun melalui penjinakan yang halus, yang keduanya sebenarnya struktural dan sistemik, yang berarti tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali.

Menurut Freire, sesuai tingkat kesadaran masyarakat, ideologi teori sosial dapat dikelompokkan dalam tiga kerangka besar. Dasar dari kerangka tersebut adalah bahwa pendidikan adalah “proses memanusiation manusia kembali” (Freire, 1998). Pemikiran semacam ini berangkat dari hasil analisisnya yang menyatakan bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat justru telah menjadikan masyarakat mengalami proses dehumanisasi. Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Dalam hal ini, Freire kemudian menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naif (*naival consciousness*), dan kesadaran kritis (*critical consciousness*).

Kesadaran magis, merupakan suatu keadaan kesadaran di mana suatu teori perubahan sosial tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor di luar manusia, baik natural maupun supernatural. Dalam perspektif Freirean, proses analisis teori sosial tersebut disebut sebagai teori sosial fatalistik. Suatu teori sosial dapat dikategorikan dalam model pertama ini jika teori tersebut memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat.

Kesadaran naif melihat ‘aspek manusia’ sebagai akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreativitas, *need for achievement* dianggap sebagai penentu dalam perubahan sosial. Analisis terhadap probema-problema kemasyarakatan menghasilkan kesimpulan bahwa semua itu terjadi disebabkan oleh kesalahan masyarakat sendiri, kemalasan mereka, semangat berkarya,

dan sebagainya. Teori perubahan sosial ini tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor *given* yang tidak mungkin teraih. Tugas teori sosial adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan sistem. Paradigma semacam ini bersifat reformatif dan bukan paham perubahan yang transformatif.

Kesadaran kritis justru melihat sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural juga adalah upaya menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berakibat pada keadaan masyarakat. Tugas teori sosial paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam suatu proses dialog “penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil”. Kesadaran seperti ini disebut sebagai kesadaran transformatif (Fakih, 2001).

### **Paradigma-paradigma Sosiologi**

Burnell dan Morgan (dalam Fakih, 2001) membuat suatu peta paradigma sosiologi menjadi humanis radikal, strukturalis radikal, interpretatif, dan fungsionalis. Sifat dan kegunaan empat paradigma tersebut adalah selain untuk memahami dan menganalisis suatu teori sosial, juga untuk memahami ideologi di balik suatu teori sosial.

Paradigma fungsionalis, berakar pada tradisi sosiologi keteraturan, pendekatannya terhadap permasalahan berakar pada pemikiran kaum objektivis. Pemikiran fungsionalisme sebenarnya merupakan sosiologi kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, kesepakatan, keterpaduan sosial, kesetiakawanan, pemuasan kebutuhan, dan hal-hal yang nyata (empirik). Rasionalitas lebih diutamakan dalam menjelaskan peristiwa atau realitas sosial. paradigma ini juga lebih berorientasi pragmatis, artinya berusaha melahirkan pengetahuan yang dapat diterapkan, berorientasi pada pemecahan masalah yang berupa langkah-langkah praktis untuk pemecahan masalah praktis juga. “Filsafat rekayasa sosial” (*social engineering*) dijadikan sebagai dasar bagi usaha perubahan sosial, serta penekanan pada pentingnya cara-cara memelihara, mengendalikan atau mengontrol keteraturan, harmoni, serta stabilitas sosial.

*Paradigma interpretatif*, sebenarnya juga menganut sosiologi keteraturan sebagaimana fungsionalisme, akan tetapi yang digunakan adalah pendekatan subjektivisme dalam analisis sosialnya sehingga hubungan dengan sosiologi keteraturan bersifat tersirat. Kenyataan sosial dipahami menurut apa adanya dengan

mencari sifat yang paling mendasar dari kenyataan sosial menurut pandangan subjektif dan kesadaran seseorang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial bukan menurut orang lain yang mengamati. Pendekatannya cenderung nominalis, antipositivis dan ideografis. Asumsi yang dipakai dalam paradigma ini adalah bahwa kenyataan sosial terbentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang sehingga diperlukan usaha untuk masuk ke dalam kesadaran dan subjektivitas pribadi manusia untuk menemukan pengertian apa yang ada di balik kehidupannya sosial. Meskipun begitu, manusia tetap dipandang sebagai hidup serba tertib, terpadu dan rapat, kemapanan, kesepakatan, kesetiakawanan di mana pertentangan, penguasaan, benturan sama sekali bukan agenda kerja mereka.

*Paradigma humanis radikal*, menekankan perlunya menghilangkan atau mengatasi berbagai pembatasan tatanan sosial yang ada. Kesadaran manusia dianggap telah dikuasai atau dibelenggu oleh suprastruktur ideologis yang ada di luar dirinya yang menciptakan pemisah antara dirinya yang murni (alienasi), atau membuatnya dalam kesadaran palsu (*false consciousness*) yang menghalanginya mencapai pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati. Oleh karena itu, adalah memahami kesulitan manusia dalam membebaskan dirinya dari semua bentuk tatanan sosial yang menghambat perkembangan dirinya sebagai manusia. Proses-proses sosial dilihat tidak manusiawi, oleh karenanya penganutnya mengecam kemapanan secara total. Hanya saja, masalah-masalah pertentangan struktural belum menjadi perhatian mereka.

*Paradigma strukturalis radikal*, memperjuangkan perubahan sosial secara radikal namun dari sudut pandang objektivisme. Pendekatan ilmiah yang sama dengan kaum fungsionalis, namun mempunyai tujuan akhir yang saling berlawanan. Bila dibandingkan dengan kaum humanis radikal, kaum strukturalis tidak terlalu menganggap penting kesadaran manusia, dan justru menekankan pada hubungan struktural yang terdapat dalam kenyataan sosial yang nyata.

## PETA PARADIGMA DALAM PSIKOLOGI

Dua kutub yang tarik menarik dalam perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan di antaranya adalah kecenderungan penggolongan psikologi sebagai ilmu sebagai ilmu alam dan sebagai ilmu sosial. Mayoritas ahli berpendapat bahwa psikologi termasuk dalam golongan ilmu-ilmu sosial meskipun metodologi yang dipakai sebagian ahli adalah menggunakan metode ilmu pengetahuan alam. Hal ini karena manusia sebagai hal pokok dalam khasanah kajian psikologi adalah merupakan objek utama pula dalam ilmu sosial.

Mengacu pada paradigma-paradigma ilmu-ilmu sosial sebagaimana dijelaskan, penulis memberanikan diri untuk mencoba memetakan posisi epistemologi psikologi yang terkaji selama ini. Dari tiga pilihan pembagian paradigma yang telah dikemukakan, psikologi selama ini didominasi oleh paradigma yang mengarah pada ilmu psikologi fungsionalis sekaligus sebagai *instrumental knowledge* yang kemudian harus dikaitkan dengan positivisme. Menurut pembagian kesadaran dari Freire, psikologi masih mendasarkan diri pada kesadaran naif sehingga fokus kajian adalah manusia sebagai penyebab segala masalah.

Para pelaku (*agent*) perubahan selama ini mendasarkan pada hasil-hasil kajian dan penelitian psikologi yang cenderung menggunakan metodologi penelitian yang memungkinkan generalisasi dan prediksi. Sebelumnya, pengetahuan teoritis yang dipakai untuk mengandaikan realita diturunkan dalam bentuk hipotesis dan instrumentasi untuk kemudian dilakukan cek empiris, sebagaimana diwakili oleh penelitian korelatif, komparatif, survei, yang kemudian mengandalkan analisis statistik di dalamnya. Metode deduktif dengan sifatnya yang *top-down* semacam ini, menurut Nugroho (2001) dikritik sebagai model yang cenderung memahami manusia hanya sebagai objek statis yang dapat dimanipulasi. Dikontrol, dan diarahkan perkembangannya, layaknya seperti sifat informasi. Penganut transendental kritis mencurigainya sebagai upaya mengebalkan diri dari tinjauan reflektif.

Selama ini fokus psikologi sangat individualis sehingga sering dikatakan sebagai ilmu elit yang hanya memperhatikan kesejahteraan diri dan menafikan lingkungan sekitar dengan cara menafikan faktor sistem dan struktur yang selama ini juga dianggap sebagai faktor utama ketidaksejahteraan manusia, biasa disebut kemiskinan struktural.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dominasi antara satu hal terhadap yang lainnya tidak akan pernah memberikan kemungkinan kesejahteraan yang optimal bagi kedua belah pihak, baik yang mendominasi maupun yang terdominasi. Pencerdasan manusia hanya dapat dilakukan bila terjadi hubungan yang dialogis di antara begitu banyak pengetahuan yang ada. Pengetahuan yang sempit seringkali menafikan para ilmuwan sendiri dalam melihat fakta sebagai objek ilmu.

Menurut Richardson (1994), fakta atau fenomena itu bagaikan sebuah kristal. Kristal adalah sebuah benda yang memiliki inti/substansi sekaligus mempunyai begitu banyak sisi. Kristal mengkombinasikan unsur simetri dan substansi dengan ragam bentuk yang tidak dapat ditentukan, begitu pula isi (*substances*), transmudasi,

multidimensionalitas, dan *angle* pendekatannya. Kristal dapat tumbuh, berubah, namun bukan berarti tidak berbentuk (*amorphous*).

Analogi kristal sebagai sebuah objek teliti mendekonstruksi ide tradisional mengenai validitas. Tidak ada kebenaran satu-satunya di dunia, sesuatu harus dilihat bagaimana dia memvalidasi dirinya sendiri. Kristalisasi memberikan pemahaman yang lebih dalam, kompleks, dan melalui hal-hal parsial-parsial terhadap sebuah topik. Sehingga, secara paradoks, seseorang dapat mengetahui lebih dan sekaligus selalu meragukan yang diketahuinya.

Sikap untuk selalu skeptis terhadap apa yang diketahui sangatlah penting bagi seorang ilmuwan. Oleh karena itu, diperlukan atmosfer yang memungkinkan seseorang selalu skeptis terhadap apa yang diketahuinya. Atmosfer semacam itu dapat dicapai bila lalu lintas paradigma-paradigma secara bebas dapat dimungkinkan sehingga tidak ada keharusan secara tidak sadar oleh seorang ilmuwan untuk mengikuti satu paradigma tertentu. Seharusnya, ilmuwan berhak memilih satu paradigma yang menurutnya sesuai dengan hati nuraninya karena tidak akan pernah ada kebenaran yang absolut berdasarkan satu paradigma saja.

Pengetahuan akan paradigma-paradigma yang berkembang di lingkungan ilmuwan di mana saja menjadi sangat penting untuk memberikan kesadaran kritis pada setiap ilmuwan terhadap keterbatasan epistemologis ilmu yang dipelajarinya. Kesadaran paradigmatik tersebut juga diperlukan agar ilmuwan dapat melakukan pilihan-pilihan acuan dan tindakan yang dianggap sesuai dengan hati nuraninya, kebijakan moralnya sebagai ilmuwan sekaligus bagian dari manusia dan kemanusiaan.

Menurut Prilleltensky, ada tiga hal yang harus dilakukan psikologi sebagai bagian dari ilmu yang menjadi agen perubahan sosial, yaitu *conscientization*, pemahaman terhadap hegemoni, dan kanteraksi hegemoni (*counteracting hegemony*). *Conscientization* adalah konsep yang dikemukakan oleh Paulo Freire, merupakan proses di mana orang dapat mencapai insight kesadaran (*insightful awareness*) akan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang selama ini mempengaruhi kehidupan mereka sekaligus kapasitas potensial yang sebenarnya mereka miliki untuk mentransformasi realitas sosial yang ada tersebut. Proses *conscientization* ini juga merupakan modal awal untuk memahami sistem sosial yang aktual dan terlanjur menghegemoni dalam masyarakat melalui berbagai institusi yang ada dalam masyarakat. Pemahaman atas kapasitas potensial yang dimiliki masyarakat juga akan sangat besar artinya dalam tindakan untuk meng-*counter* hegemoni yang ada.

Hegemoni yang terbentuk dalam lingkungan akademis yang paling dapat dicermati adalah yang terkandung dalam kurikulum dan perspektif mapan yang

digunakan oleh civitas akademik yang ada. Diperlukan sikap yang adil terhadap kemungkinan-kemungkinan pembukaan cakrawala perspektif anak didik sehingga kecenderungan paradigma atau perspektif yang terjadi bukanlah satu kenafian dan keniscayaan yang terkonstruksi secara sistemik, tapi lebih merupakan pilihan sadar dari para peserta didik sebagai generasi yang akan menjadi agen perubahan sosial nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danziger, K. 1990. *Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fakih, M. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.
- Freire, P. 1998. Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan. *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis*. Naomi, O.I. (Peny. & Pen). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hughes, J.A. 1990. *Aspect of Modern Sociology: The Philosophy of Social Research. Second Edition*. New York: Longman Inc.
- Kuhn, T. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mulyana, D. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H. 2001. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patria, N. & Arie, A. 1999. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prilleltensky, I. 1994. *The Morals and Politics of Psychology: Psychological Discourse and the Status Quo*. New York: State University of New York Press.
- Richardson, L. 1994. Writing. A method of Inquiry. *Handbook of Qualitative Research*. Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. (Eds.). London: Sage.